

# **Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Human Security**

*(Community Empowerment during the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Human Security)*

**Amelia Syauket & Djuni Thamrin**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

## **Abstract**

*This article aims to find out various forms of community empowerment during the Covid-19 Pandemic in the perspective of human security. This article uses qualitative research methods with a phenomenological approach that is very appropriate to use to see one of the government's functions in the form of Community Empowerment. By prioritizing library data sources, the discussion is presented in a descriptive-narrative manner. The conclusion that can be drawn from this research is that the function of government in the form of community empowerment, especially the provision of services in the health sector, has been going well by prioritizing the wider community with various program activities that directly touch the people affected by the COVID-19 pandemic. This is in line with the human security perspective that the State is here to protect the weak and helpless in the face of the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** *Community Empowerment; human security; Covid-19*

## **Abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif human security. Artikel ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang sangat tepat digunakan untuk melihat salah satu fungsi pemerintah berupa Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Dengan mengutamakan sumber data kepustakaan, pembahasan disajikan secara deskriptif-naratif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa fungsi pemerintahan berupa pemberdayaan masyarakat khususnya penyediaan pelayanan di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik dengan mendahulukan masyarakat luas dengan berbagai program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan perspektif human security bahwa Negara hadir melindungi masyarakat yang lemah tidak berdaya dalam menghadapi pandemi covid-19.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat; Keamanan Insani; Covid-19*

## Pendahuluan

Tidak pernah diprediksi sebelumnya jika tahun 2020 ini akan dikenang dunia sebagai salah satu tahun paling gelap dalam sejarah kehidupan manusia. Karena Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kejadian luar biasa dalam bidang kesehatan, baik di dunia maupun di Indonesia serta menimbulkan krisis ekonomi, keuangan, serta mengganggu aktivitas masyarakat secara masif. Kementerian Kesehatan RI menggambarkan, pandemik Covid-19 telah memaksa orang tidak lagi dapat melakukan aktivitas secara bebas, dan harus menahan diri dalam menghindari penyebaran Covid-19. Artinya Covid-19 tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mengganggu aspek kehidupan lainnya. Tidak ada yang lebih dahulu diselesaikan, tetapi keduanya harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegrasi satu dengan lainnya<sup>1</sup>.

Munculnya pandemi Covid-19 sekaligus mempertegas tentang realitas bahwa sebagai manusia kita semua terhubung erat dalam ketidakamanan kesehatan yang disebabkan oleh virus. Batas-batas negara dengan mudahnya “disusupi” virus, sehingga Covid-19 demikian cepat menyebar semenjak muncul dari Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Ketika awal muncul, penyakit ini tergolong misterius. Sumber penularan kasus pneumonia misterius pada mulanya belum diketahui secara pasti, tetapi untuk kasus pertama diduga terkait dengan pasar ikan di Wuhan.<sup>2</sup> Sejak 18 hingga 31 Desember 2019 kasusnya terus meningkat hingga mencapai 44 kasus. Dalam kurun waktu kurang dari sebulan penyakit pernapasan itu telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.<sup>3</sup>

Sebagai manusia yang saling terhubung kita dihadapkan pada ketidakadilan struktural dan ketidaksetaraan distribusi, yang antara lain berdampak pada ketahanan dan keamanan. Di sini kita juga melihat bahwa sistem multilateral yang ada dalam masyarakat global, tidak memadai untuk menghadapi situasi pandemik Covid-19. Latar masalahnya bermacam, seperti postur geopolitik, dan juga pemikiran tentang segala bentuk pemerintahan transnasional yang justru membuat frustrasi.<sup>4</sup> Untuk mengatasi Covid-19, kedaulatan negara saja tidak cukup. Di sini kita melihat adanya tali-temali antara kebijakan negara, inovasi dalam teknologi kedokteran (vaksin dan tes antibodi), alat produksi (masker, alat pelindung diri/ APD, ventilator), *financial flow* yang menyangkut urusan pembayaran (transfer dana), perdagangan dan distribusi barang, keahlian, kecakapan dalam penanganan medis, dan banyak hal lainnya yang difokuskan untuk memerangi pandemi.

---

<sup>1</sup> R Christiawan, Politik Hukum Kontemporer (Depok: Radja Grafindo Persada, 2020).

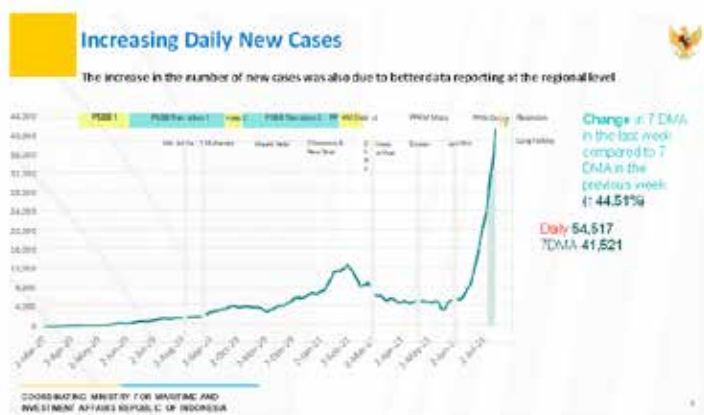
<sup>2</sup> Hussin A Rothan & Siddappa N Byrareddy. “The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak.” *Journal Autoimmun.* 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.

<sup>3</sup> Chaolin Huang, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.” *Lancet.* 2020;395(10223):497-506.

<sup>4</sup> Antonio Donini, “Post-pandemic change? Humanitarian action and multilateralism in transnational times”, *Against Inhumanity*, 20 April 2020. <http://www.against-inhumanity.org/2020/04/20/post-pandemic-change-humanitarian-action-and-multilateralism-in-transnational-times/>

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara menjadi sentral dalam memproduksi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam konteks hak asasi manusia, terkadang kebijakan negara dalam penanganan pandemik mengundang kontroversi. Hal itu terjadi di negara-negara maju maupun berkembang. Dalam beberapa kasus, kebijakan *lockdown* mendapat protes oleh sebagian warga setempat, karena dianggap kurang dalam sosialisasi, yang diantaranya menyebabkan para pekerja migran terabaikan hak-haknya.<sup>5</sup> Kegugupan dunia dalam penanganan Covid-19 juga ditengarai dengan bagaimana aparat negara (lokal maupun nasional) sibuk untuk mengadopsi penggunaan alat deteksi Covid-19.<sup>6</sup> Di banyak negara pemerintah setempat bahkan menggandeng pihak swasta untuk urusan pemantauan.<sup>7</sup> Apa yang dilakukan oleh banyak negara-negara di dunia tersebut tidak luput dalam perspektif keamanan nasional mereka.

Akibat dari penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, juga menyebabkan Indonesia mengalami kepanikan dan kesulitan dalam menghadapinya. Kepanikan ini terjadi karena Covid-19 adalah penyakit baru namun penyebarannya begitu cepat<sup>8</sup>. Data dari Menteri Koordinator Kemaritiman & Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali menunjukkan *trend* yang mengkhawatirkan karena peningkatan kasus setiap hari nya. Pada Edugrafis-1 di bawah ini menjelaskan fenomena tersebut:



Source : General Army (Ret.) Luhut B. Pandjaitan Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs July 15, 2021

<sup>5</sup> Vikas Panday. BBC, "Coronavirus lockdown: The Indian migrants dying to get home", 20 Mei 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52672764>

<sup>6</sup> Ali Funk. "Fighting Covid-19 Shouldn't Mean Abandoning Human Rights", Wired.com, 9 April 2020. <https://www.wired.com/story/opinion-fighting-covid-19-shouldnt-mean-abandoning-human-rights/>

<sup>7</sup> Naomi Klein. "How big tech plans to profit from the pandemic", The Guardian, 13 May 2020. [https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic?CMP=Share\\_iOSApp\\_Other](https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic?CMP=Share_iOSApp_Other)

<sup>8</sup> M J Panjaitan, Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia (APPTH: Pustaka Reka Cipta, 2020).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menepungkan salah satu fungsi pemerintah berupa pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Fungsi pemberdayaan masyarakat sejalan dengan pemahaman human security bahwa fungsi pemerintahan tersebut bukan hanya membantu tetapi juga memberdayakan masyarakat. Artikel ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder atau kajian literatur dimana pencarian literatur dilakukan melalui di Google Scholar dan Google Engine dengan kata kunci tertentu dalam periode publikasi 2020-2021.

## Pembahasan

Pandemi virus corona (Covid-19) kini tengah mengancam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, dengan kondisi pandemik Covid-19 yang terjadi begitu tiba-tiba membuat masyarakat di seluruh dunia panik. Pada masing-masing Negara memiliki kebijakannya masing-masing pada protocol penanganan pasien Covid-19. Sebagian Negara menerapkan kebijakan penanganan berdasarkan usia, ada juga yang menerapkan tingkat keseriusan medis maupun sebagian Negara menentukan penanganan berdasarkan status sosial dari pasien yang terinfeksi Covid-19. Pilihan tiap-tiap negara memiliki pertimbangan masing-masing dalam penanganan covid-19<sup>9</sup>.

Bryan Desere<sup>10</sup> mengungkapkan dalam kondisi bencana dan ketidakpastian maka hubungan antara Negara dalam hal ini pemerintah dengan warga negaranya menjadi suatu hubungan yang bersifat *state paternalistic*. Artinya peran Negara sangat dominan dalam menentukan kelangsungan kehidupan warganegaranya. Maknanya dalam kondisi pandemik Covid-19 seperti ini, pemerintah memegang peranan yang besar dalam menentukan perlindungan warganegara, baik yang telah terinfeksi covid-19 maupun agar tidak terinfeksi covid-19<sup>11</sup>.

Bryan Desere<sup>12</sup> melanjutkan bahwa dalam konsep *state paternalistic*, Negara harus memberikan perlindungan kepada warganegaranya yang paling lemah dan kurang beruntung. Ukuran humanistik dalam penanganan Covid-19 yang harus dipergunakan oleh Pemerintah adalah memberi prioritas pada masyarakat yang paling kurang beruntung. Definisi kurang beruntung salah satunya menurut tingkat kesehatan.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> B Desere, *Theory of State Paternalistic* (blackstone press Limited, 2000).

<sup>11</sup> Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer*.

<sup>12</sup> Desere, *Theory of State Paternalistic*.

masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya<sup>13</sup>. Upaya penanganan oleh pemerintah salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan dan mencegah penularan Covid-19<sup>14</sup>.

*Community empowerment* (pemberdayaan masyarakat/komunitas) adalah segala daya upaya yang memungkinkan masyarakat dapat berproses untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan kehidupan mereka. Komunitas merupakan kelompok orang yang terhubung atau mungkin tidak terhubung secara khusus, tetapi mereka memiliki minat, perhatian, atau identitas yang sama. Komunitas dapat memiliki kepentingan khusus maupun luas, baik bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional. *Empowerment* (pemberdayaan) dapat dimaknai bagaimana orang memperoleh kendali atas faktor-faktor dan keputusan yang membentuk kehidupan mereka. Dalam hal ini berarti ada proses di mana mereka meningkatkan aset dan atribut mereka dan membangun kapasitas untuk mendapatkan akses, mitra, jaringan dan/atau suara, untuk mendapatkan kendali. "Memberdayakan" memberikan gambaran bagaimana orang tidak dapat "diberdayakan" oleh orang lain melainkan oleh diri mereka sendiri dengan memperoleh lebih banyak bentuk kekuasaan yang berbeda.

Ini mengasumsikan bahwa orang adalah aset mereka sendiri, dan peran agen eksternal adalah untuk mengkatalisasi, memfasilitasi atau "menemani" komunitas dalam memperoleh kekuasaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat, tetapi adanya kepemilikan dan tindakan masyarakat yang jelas-jelas bertujuan untuk perubahan sosial dan politik. Dalam konteks kesehatan, maka pemberdayaan masyarakat harus bisa mengatasi determinan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta berupaya membangun kemitraan dengan sektor lain dalam mencari solusi.

*Human Security* memiliki dua makna, pertama, keamanan dari seperti ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Kedua, *human security* juga berarti proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat entah di dalam rumah, pekerjaan maupun dalam masyarakat<sup>15</sup>. Tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat individu manusia yang dibawa oleh Covid-19 menggambarkan bagaimana pandemi lebih dari sekedar krisis kesehatan. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak, bagaimana kita datang bersama sebagai komunitas internasional untuk mengatasinya, strategi apa yang paling cocok untuk

---

<sup>13</sup> K Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal EKonomi Pembangunan 12, no. 1 (2011): 15-27.

<sup>14</sup> L M Situmorang, L R Widhy, and P D Indriastutty, "Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Paper Knowledge," Toward a Media History of Documents (2021).

<sup>15</sup> R J Ray, *The Human Security Framework and National Human Development Reports* (Sussex: United Nation Development Programme, 2006).

melindungi dan memberdayakan orang, terutama mereka yang paling rentan, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya<sup>16</sup>.

Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan memecahkan permasalahan kesehatannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun tokoh masyarakat<sup>17</sup>. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan dan mencegah penularan COVID-19<sup>18</sup> Keppres Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavarius Disease* 2019<sup>19</sup>.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah di bidang kesehatan, antara lain peningkatan tingkat vaksinasi, dengan Cakupan Vaksinasi Per Provinsi Terus Menerus yang semakin luas, Tambahan Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit, pemenuhan kebutuhan obat, termasuk Pembagian Gratis Paket Obat Covid-19 dengan Ringan Gejala dan Tanpa Gejala (OTG), Pemenuhan Kapasitas Oksigen, Penambahan Tenaga Kesehatan : Dokter dan Perawat di tiap Provinsi dengan percepatan kelulusan tenaga kesehatan dengan tujuan pemenuhan atas kesenjangan di tiap provinsi, Kesenjangan bagi tenaga kesehatan, keduanya perawat dan dokter, akan diisi oleh mahasiswa kedokteran dan perawat yang sudah berada di tahun-tahun terakhir pendidikan. Berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah<sup>20</sup>.

Seperti yang telah dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi selaku Kordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan, tampak seperti pada edugrafis-2 di bawah ini :

---

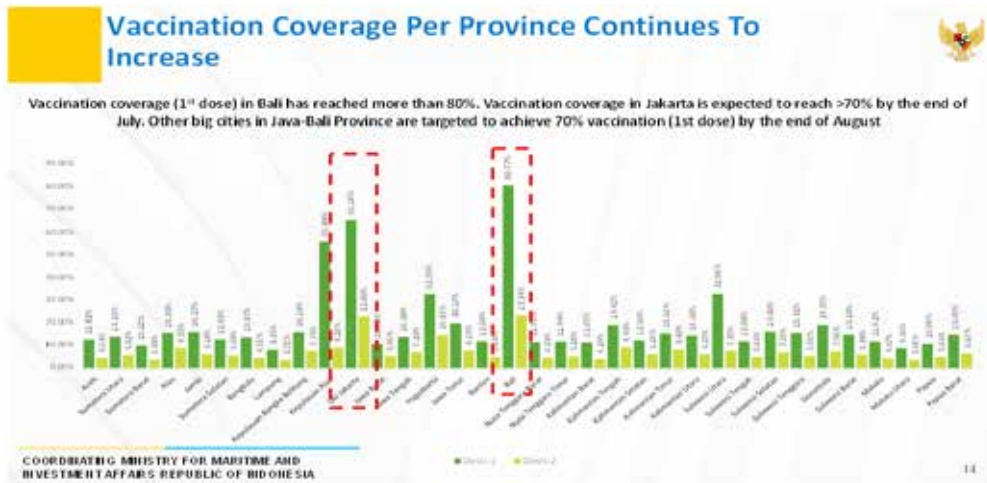
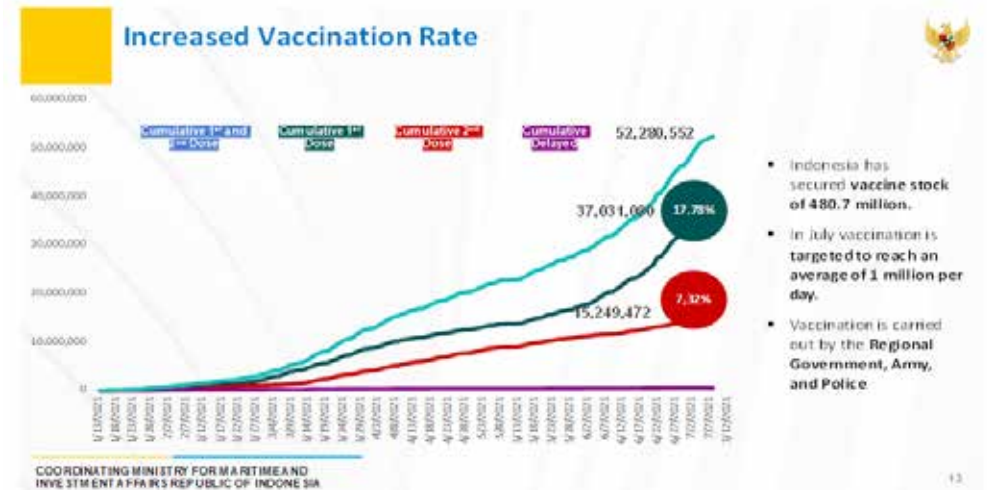
<sup>16</sup> P Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

<sup>17</sup> A V R Pramudyani et al., "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menuju Desa Siaga Oleh KKN UAD Di Watu Gajah Dan Mertelu, Gendangsari, Gunung Kidul," Jurnal Pemberdayaan 3, no. 1 (2019): 5-24.

<sup>18</sup> "Keppres Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavarius Disease* 2019 (Covid-19)" (2020).

<sup>19</sup> "Memperkuat Komunitas Dalam Penanganan Covid-19," Fakultas Psikologi UI, 2020, <https://psikologi.ui.ac.id/2020/05/06/21049/>.

<sup>20</sup> "Pemaparan Meteri Kordinator Bidang Kelautan Dan Investasi RI," 2021.



### Additional Hospital Bed Capacity

The government has prepared a scenario in case of a significant increase in cases

#### Strategy to Meet the Needs of the Bed

- Isolation and intensive bed conversion up to 40% total hospital bed capacity
- Opening of emergency/field hospitals for intensive care and isolation, especially for districts and cities where the COVID-19 bed conversion capacity is >40% of the total hospital bed capacity.
- Addition of special hospitals to treat covid-19 patients' patient

#### Meeting the needs of additional bed capacity include:

- 1** Pondok Gede Haji Dormitory – 900 beds, Arafah Building 150 ICUs, Construction of the Tanjung Duren Hospital with 500 beds for the treatment of moderate to severe symptoms.
- Increasing the capacity of hospitals or health service facilities for the Army/Police to serve Covid-19 patients with the addition of >2000 beds in Java and Bali
- Utilization of education and training and guesthouses owned by various ministries/agencies for Covid-19 isolation.
- Use of hospitals and facilities owned by the Army and Police

**COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA**

## Steps to Fulfill Drug Needs

Medicine	Demand Estimation	Remaining Stock	Additional Stock for July			Total Stock until the End of July 2021	Stock/Demand	Remaining Stock until the End of July 2021
			M2	M3	M4			
1. Methylgluc	5,437,100	54,214,204	-	-	-	64,114,204	67%	54,214,204
2. Azithromycin	1,775,602	43,356,614	1,716,780	1,732,400	2,200,950	48,002,744	11%	43,356,614
3. Acetaminofen	2,022,237	-	3,100,000	3,100,000	3,600,000	6,800,000	34%	3,777,763
4. Quinine	4,794,878	-	1,054,000	2,221,000	2,341,000	4,216,000	27%	1,254,102
5. Paracetamol	15,862,580	-	4,370,000	2,500,000	-	6,870,000	21%	12,892,580
6. Ibuprofen	3,751,234	-	196,000	160,000	-	326,000	17%	1,625,234
7. Tocilizumab	70,256	-	-	-	2,800	2,800	4%	48,156
8. Nitro	1,435,114	-	28,375	15,000	25,380	19,660	5%	1,345,414

**Encouraging the commitment of domestic and foreign industries to fulfill COVID-19 drug supply**

- Tocilizumab and IVIG:** Encourage global producers (Asterand Roche, etc.) to provide the supply of their products to Indonesia and alternative additional supplies from other producers (China, etc.) through the Special Access Scheme (SAS) and donations.
- Remdesivir:** encourage additional quotas to import products from India, Bangladesh, Egypt, and China.
- Favipiravir:** acceleration and increase in domestic production.

**Encouraging even distribution of drugs between regions to prevent sporadic drug shortages**

**List of drugs in the process of being imported from other country:**

- Intravenous immune globulin ("IVIG")
- Interferon-β Tocilizumab: 39,000 vials
- Remdesivir
- Favipiravir

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 17

## Free Distribution of Covid-19 Drug Packages with Mild Symptoms and Without Symptoms (OTG)

**Self Isolation (Isoman) Package**

No	Items	Description
1	Name	Free Distribution of Covid-19 Drug Packages with Mild Symptoms and Without Symptoms (OTG)
2	Number of Packages	300,000 Packages with following composition: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% for People Without Symptoms</li> <li>• 60% for symptoms of fever and anuria</li> <li>• 30% for Mild Symptoms fever and cough</li> </ul>
3	Target	Priority for the poor affected by Covid-19 with mild symptoms & without symptoms (OTG).
4	Package Allocation	The allocation is based on the number of active cases undergoing self-isolation (Isoman) in each district/city. The Army's Health Center will be the command center for the distribution of this drug together with each military area health (Koramil).

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 18

## Rice Assistance Program for the Community

11 thousand tons of rice will be distributed (1 Household = 10 kg) for assistance throughout Java and Bali during Emergency PPKM. Distribution is being done as soon as possible, no later than the second week of July.

Province	Number of Poor People (Sept 2020)	Coverage Target of Poor People	Number of Coverage	Number of HH (200000 People)	Rice needs		Cost (Rp Bn)
					kg	Ton	
DKI Jakarta	436,682	30%	130,903	67,261	172,663	173	3,9
Banten	857,660	30%	257,292	64,323	643,293	643	4,8
West Java	4,188,520	80%	3,350,816	1,141,139	3,141,393	3,141	13,0
Central Java	4,119,300	30%	1,235,790	308,995	3,089,988	3,090	12,4
DIY	501,180	30%	150,354	37,734	177,355	177	4,0
East Java	4,585,970	30%	1,375,791	341,946	3,439,479	3,439	16,1
Bali	196,920	30%	59,076	14,769	147,690	148	3,8
<b>Total</b>	<b>14,546,860</b>	<b>30%</b>	<b>4,484,888</b>	<b>1,131,172</b>	<b>11,211,726</b>	<b>11,212</b>	<b>117,7</b>

- The target beneficiaries are daily workers and informal workers, especially in densely populated areas (slum areas) affected by the emergency PPKM.
- Criteria for recipients of assistance can be further determined according to the situation on the ground.
- Army/Police regulate the distribution of aid so as not to cause crowds.

- Market merchant
- Online motorfari driver (ojek)
- Taxi/angkot/bajaj driver
- Kaki Lima vendors
- Asongan vendor
- Food stall owners and staff
- Construction worker/Portman
- Scavengers, etc

COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AND INVESTMENT AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA 23



Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memaksimalkan upaya untuk memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona sebagai penyebab penyakit Covid-19 melalui berbagai langkah, salah satunya adalah mengampanyekan gerakan cuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Mencuci tangan menggunakan sabun merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk menghindari kuman dan virus menempel pada area tangan. Namun, ada hal lain yang disarankan yaitu menggunakan cairan pembunuh kuman dan virus seperti *hand sanitizer*. Akibat sering kali sulit untuk menemukan tempat untuk mencuci tangan pada tempat tertentu, maka penggunaan *hand sanitizer* diharapkan dapat meminimalkan penularan kuman dan virus kepada orang lain.

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *Human Security* atau kerap disebut juga dengan Keamanan Insani salah satunya berupa Kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi keamanan insaninya dalam segi ekonomi dengan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakatnya yang terkena dampak, terutama usaha individu, usaha kecil serta usaha menengah. Karena Tingkat konsumsi yang cenderung melemah selama pandemi juga dinilai akan mengancam stabilitas ekonomi secara berkepanjangan. Program Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah yang telah diselenggarakan antara lain Program Bantuan Beras untuk Masyarakat dengan segmen penerima antara lain Pedagang pasar, Motor/taksi online, sopir (ojek), Taksi/angkot/bajaj, pengemudi, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Asongan, satpam, pemulung.

Masing-masing Beras 11 ribu ton akan disalurkan (1 KK = 10 kg) untuk bantuan se-Jawa dan Bali selama PPKM Darurat. Edugrafis-3 di bawah ini menggambarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah

Tidak dapat dimungkiri bahwa ancaman terhadap kelangsungan hidup, mata pencaharian, dan martabat individu manusia yang dibawa oleh Covid-19 menggambarkan bagaimana pandemi lebih dari sekadar krisis kesehatan. Dengan demikian, keamanan manusia menawarkan perspektif alternatif tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan global yang mendesak dan strategi apa yang paling cocok untuk melindungi dan memberdayakan orang, terutama mereka yang paling rentan, dan bagaimana mengalokasikan sumber daya<sup>21</sup>. Untuk menangani hal tersebut, perlu suatu pendekatan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar akan rasa aman masyarakat sebagai solusi permasalahan yang terjadi akibat Covid-19. Pendekatan tersebut disebut dengan *human security*.<sup>22</sup>

Pada awal tahun 2021, indeks yang dilakukan oleh Institut Lowy menempatkan Indonesia pada peringkat ke 85 dari 98 negara yang disurvei dengan mempertimbangkan kasus positif, angka kematian, dan jumlah tes perseribu

---

<sup>21</sup> Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial.

<sup>22</sup> K Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Ekonomi Pembangunan 12, No. 1 (2011): 15-27.

penduduk di masing-masing Negara. Berdasarkan Peringkat tersebut, Indonesia masuk dalam kategori terbaik atau cepat dalam merespon adanya Pandemi Covid-19 dan penanganannya.<sup>23</sup> Maksudnya, program pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan telah dijalankan dengan baik dalam melindungi masyarakat dari dampak Pandemi Covid-19 yang sejalan dengan pemahaman *human security*.

Pemberdayaan masyarakat pada masa pandemik Covid-19 bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan perguruan tinggi dalam pengabdian mereka kepada masyarakat. Tergerak dan prihatin menyaksikan fenomena sejumlah masyarakat yang terpaksa menggunakan minyak goreng berkali-kali untuk menggoreng makanan konsumsi keluarga mereka, sekelompok dosen di Tengerang Selatan memberikan pelatihan pemanfaatan minyak jelantah untuk membuat sabun.<sup>24</sup> Jadi, minyak jelantah diarahkan untuk tidak lagi dikonsumsi tetapi tetap dapat dimanfaatkan oleh warga dengan produk sabun. Perlu dicatat, bahwa penggunaan minyak goreng bekas (jelantah) untuk memasak berulang kali, berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Konsumsi makanan yang diolah dengan minyak jelantah (mengandung asam lemak jenuh) berpotensi memicu penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan kanker.<sup>25</sup>

## Penutup

Berdasarkan kajian literatur, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya dalam pencegahan Covid-19 dengan melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah telah mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 dengan mendahulukan masyarakat luas dengan ukuran humanism yang tepat dengan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan antara lain yaitu, Ketersediaan vaksin lebih dari cukup. Upaya untuk meningkatkan kecepatan vaksinasi menjadi rata-rata 1 juta per hari telah dilakukan. Ketersediaan tempat tidur dipenuhi dengan langkah-langkah konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit lapangan, dan penambahan rumah sakit khusus Covid-19. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN bersama TNI dan Polri telah berkoordinasi untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat digunakan untuk rumah sakit atau tempat isolasi.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan obat, termasuk melalui impor dan bantuan luar negeri. Paket obat gratis Program yang

<sup>23</sup> "Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2009.

<sup>24</sup> Uswatun Chasanah, Aulia Nursyifa, Juhaeri, Imam Sofi'I, "Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 melalui Pembuatan Sabun Cuci dari Minyak Jelantah sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan", JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol. 2, No. 1, (Februari 2021): 8-16; DOI: <https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i1.111>

<sup>25</sup> Syahrída Dian Ardhaný dan Lamsiyah. "Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda Tentang Bahaya Penggunaan Minyak Jelantah Bagi Kesehatan." Jurnal Surya Medika, 3,2, (2018)

akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Pemerintah mengerahkan dokter dan perawat di tahun-tahun terakhir pendidikan mereka. Pasokan oksigen akan dipenuhi melalui peningkatan produksi dalam negeri dari industri, impor, dan bantuan luar negeri. Pemerintah memiliki kemampuan membeli konsentrator oksigen untuk mengurangi kebutuhan oksigen cair. Saran yang disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan pada artikel ini berupa perlunya monitoring yang terus menerus dan berjenjang dalam pendistribusian berbagai bantuan pemerintahan agar tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

- Ardhany, Syahroda Dian dan Lamsiyah. "Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda Tentang Bahaya Penggunaan Minyak Jelantah Bagi Kesehatan." *Jurnal Surya Medika*. 3.(2).2018.
- Chasanah, Uswatun, Aulia Nursyifa, Juhaeri, Imam Sofi'i, "Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 melalui Pembuatan Sabun Cuci dari Minyak Jelantah sebagai Upaya Mengurangi Pencemaran Lingkungan." *JPKMI. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*. Vol. 2.No. 1.2021.
- Christiawan, R. *Politik Hukum Kontemporer*. Depok: Radja Grafindo Persada. 2020.
- Desere, B. *Theory of State Paternalistic*. blackstone press Limited, 2000.
- Funk, Ali. "Fighting Covid-19 Shouldn't Mean Abandoning Human Rights." *Wired.com*. 9 April 2020.
- Huang., Chaolin, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. "Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China." *Lancet*. 2020.
- Klein, Naomi. "How big tech plans to profit from the pandemic." *The Guardian*.13 May 2020.
- Panday, Vikas. "Coronavirus lockdown: The Indian migrants dying to get home." *BBC*. 20 Mei 2020.
- Panjaitan, MJ. *Pola Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia*.APPTHI: Pustaka Reka Cipta. 2020.
- Pramudyani, A VR, A Setiawan, A Fajariyansyah, and G L Aji. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Menuju Desa Siaga Oleh KKN UAD Di Watu Gajah Dan Mertelu, Gendangsari, Gunung Kidul." *Jurnal Pemberdayaan*. 3. No. 1.2019.
- Ray, R J. *The Human Security Framework and National Human Development Reports*. Sussex: United Nation Development Programme. 2006.
- Rothan HA, Byrareddy SN. "The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak". *J Autoimmun*. 2020.
- Simanjuntak, P. *Manajemen Hubungan Industrial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.
- Situmorang, L M, L R Widhy, and P D Indriastutty. "Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Paper Knowledge." *Toward a Media*

History of Documents. 2021.

Widjajanti, K. "Model Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal EKonomi Pembangunan* 12. No. 1. 2011.

### **Peraturan dan Undang-undang**

Keppres Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavarius Disease 2019 (Covid-19). 2020

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.